

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BIDANG KESEHATAN

Robiyati Podungge

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak: Peran pemerintah daerah dalam peningkatan pelayanan kesehatan dilihat dari instrumen kebijakan yang dipakai pemerintah daerah adalah instrumen wajib. Penggunaan instrumen wajib ini terlihat dari besarnya peran pemerintah dalam pelayanan kesehatan tanpa ada campur tangan swasta. Faktor pendukung terdiri dari: dukungan penuh pembiayaan fasilitas medis dan biaya operasional rumah sakit, aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan dan kunjungan pasien yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan faktor yang dapat menghambat peningkatan kualitas pelayanan kesehatan meliputi: tidak seimbangnya rasio antara jumlah para medis dengan pasien, masih kecilnya tunjangan daerah bagi pegawai rumah sakit, masih minimnya program pengembangan SDM, dan terbatasnya sarana & prasarana rumah sakit.

Kata-kata kunci: Pemerintah Daerah, Kualitas Pelayanan, Kesehatan

Sejak diterapkannya UU No. 29 tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 telah terjadi pergeseran pelaksanaan administrasi publik di Indonesia yang semula menganut asas sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan penerapan sistem desentralisasi ini maka pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hoessein (*dalam*, Muluk 2007: 9) mengungkapkan bahwa desentralisasi mencakup dua elemen pokok. Pertama, pembentukan daerah otonom, dan kedua, penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otonom tersebut. Dari kedua elemen pokok tersebut lalu lahirlah apa yang disebut sebagai *local government*.

Di Indonesia pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur dalam UU 32 tahun 2004 dan PP No. 38 tahun 2007. Berdasarkan UU 32 tahun 2004 dan PP No. 38 tahun 2007 urusan yang

menjadi kewenangan pemerintah daerah dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar, misalnya pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan yang lainnya. Sementara urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, misalnya kelautan dan perikanan, kehutanan, pertanian dan yang lainnya.

Dapat dipahami bahwa pelayanan kesehatan termasuk ke dalam urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan di daerahnya. Menurut Stewart (1995: 79) salah satu ciri penting yang membedakan otoritas lokal dari organisasi sektor swasta adalah bahwa publik bukan hanya sebagai pelanggan namun juga sebagai warga negara. Jika mereka di hormati sebagai pelanggan, maka mereka juga dihormati sebagai warga Negara. Ada tanggungjawab ganda terhadap otoritas lokal dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Pelayanan publik termasuk bidang kesehatan oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Pelayanan yang diberikan terlalu berbelit-belit dengan alasan sesuai prosedur, banyaknya biaya pungutan dan waktu yang sangat lama, sehingga pelayanan yang diberikan cenderung tidak efektif dan efisien. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Penelitian Indonesia *Institute for Civil society* (INCIS) yang dilakukan pada 480 responden di Jakarta menghasilkan bahwa kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah selama ini belum memuaskan. (Sinambela, 2007: 117-119).

Rendahnya kualitas pelayanan publik di berbagai daerah menunjukkan masih belum maksimalnya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam kerangka kebijakan otonomi daerah, pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan merupakan salah satu tugas pemerintah daerah yang sudah didesentralisasi oleh pemerintah pusat (pasal 22 UU No. 32 tahun 2004). Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur sistem pemerintahan dan rumahtangganya sendiri di bidang kesehatan dengan memilih kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki daerah. Kewenangan daerah ini merupakan

konsekuensi logis untuk mencapai efektivitas pengelolaan pelayanan, sekaligus suatu tanggungjawab yang harus dilaksanakan sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan besarnya peran pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan di bidang kesehatan sehingga harus ada upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan.

Namun kenyataannya pelayanan bidang kesehatan di daerah belum bisa memenuhi harapan masyarakat. Berdasarkan hasil survei lembaga swadaya masyarakat Kemitraan, Pusat Telaah dan Informasi Regional serta Koalisi Gerakan Rakyat Anti Pemiskinan (selasa, 25 September 2008) yang melibatkan 400 responden di 115 kelurahan di 42 kecamatan di Jakarta, terungkap bahwa hampir 65 % responden memberi nilai minus untuk setiap aspek pelayanan termasuk pelayanan kesehatan. Sebagian pemegang kartu keluarga miskin masih sulit mendapat pelayanan perawatan kesehatan. Beberapa diantara mereka diwajibkan membayar 25-35 % dari total biaya perawatan. (Kompas, Rabu 26 November 2008).

Menurut Sekeon (2004) dalam penelitiannya tentang Pelayanan Kesehatan menyatakan bahwa secara umum masalah kesehatan yang dihadapi daerah dewasa ini seperti perbedaan status kesehatan antar daerah yang masih tinggi, rendahnya kualitas kesehatan penduduk miskin, beban ganda penyakit. Masih rendahnya kualitas, kuantitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan merupakan tantangan nyata yang dihadapi selama era otonomi daerah ini. Selain itu, pelayanan kesehatan yang dihadapkan juga pada rendahnya kondisi kesehatan lingkungan, dan masalah pendanaan kesehatan. Di satu sisi terlihat besarnya masalah yang dihadapi daerah tetapi disisi lain tersirat lemahnya kapasitas pemerintah daerah khususnya di tataran kabupaten/kota.

Desentralisasi dan Pemerintah Daerah

Definisi yang diberikan terhadap kata “desentralisasi” sangat beragam. Rondinelli dan Cheema seperti yang dikutip Dwiyanto (2006: 46) memahami *decentralization* secara luas, yaitu perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah serta manajemen dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah.

Sedikit berbeda dengan pendapat Rondinelli di atas, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) desentralisasi dapat dilakukan dengan mendelegasikan kewenangan kepada pejabat-pejabat di luar ibu kota (*deconcentration*) maupun kepada kantor atau lembaga otonom di tingkat lokal (*devolution*). Dengan dekonsentrasi berarti terdapat perangkat wilayah

yang berada di luar kantor pusat. Departemen pusat melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab bidang tertentu yang bersifat administratif kepada pejabat mereka yang berada di wilayah/daerah tanpa menyerahkan kekuasaan sepenuhnya sehingga pertanggung jawaban akhir tetap berada pada departemen pusat. Sedangkan dalam devolusi, sebagian kekuasaan yang diserahkan kepada badan politik di daerah merupakan kekuasaan penuh untuk mengambil keputusan baik secara politik maupun administratif. (Dwiyanto, 2006: 47).

Selanjutnya dalam UU No. 32 tahun 2004 desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka desentralisasi, daerah otonom berada di luar hirarki organisasi pemerintah pusat, sedangkan dalam dekonsentrasi *field administration* berada dalam hirarki organisasi pemerintah pusat. Desentralisasi menunjukkan pola hubungan kewenangan antar organisasi. Sekalipun hubungan antara *local government* dengan pemerintah merupakan hubungan antar organisasi, namun *local government* (daerah otonom) ciptaan pemerintah. Oleh karena itu keberadaan *local government* adalah *dependent* dan *sub-ordinate* terhadap pemerintah. Berbeda dengan desentralisasi, dekonsentrasi melahirkan pola hubungan kewenangan intra organisasi.

Hoessein seperti yang dikutip Muluk (2007: 9) mengungkapkan bahwa desentralisasi mencakup dua elemen pokok. Pertama, pembentukan daerah otonom, dan kedua, penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otonom tersebut. Dari kedua elemen pokok tersebut lalu lahirlah apa yang disebut sebagai *local government*.

Pemerintahan daerah (*local government*) menurut United Nations (1961) yang dikutip oleh Meenakshisundaram dalam (Jha dan Mathur, 1999:58) adalah suatu sub-divisi politik pada suatu bangsa (dalam suatu negara federal, di AS), yang dibentuk atas hukum dan memiliki kewenangan penuh atas urusan lokal termasuk dalam menarik pajak dan penggunaan tenaga kerja lokal untuk tujuan tertentu dan pejabat pemerintahan ditentukan melalui pemilihan.

Hoessein (*dalam*, 2007: 9), mengungkapkan bahwa *local government* ini merupakan sebuah konsep yang dapat mengandung tiga arti. *Pertama*, ia berarti pemerintah lokal yang kerap kali dipertukarkan dengan *local authority*

yang mengacu pada organ, yakni *council* dan *mayor* dimana rekrutmen pejabatnya didasarkan pada pemilihan. *Kedua*, ia mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal. Arti kedua ini, lebih mengacu pada fungsi. Dalam menentukan fungsi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, menggunakan prinsip *the ultra vires doctrine* dan *general competence atau open end arrangement*. *The ultra vires doctrine* menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat bertindak pada hal-hal tertentu atau memberikan pelayanan tertentu saja. Fungsi atau urusan pemerintahan bagi pemerintah daerah dirinci sedangkan fungsi pemerintahan yang tersisa menjadi kompetensi pemerintah pusat. Prinsip *general competence atau open end arrangement*, artinya bahwa pemerintah daerah harus melakukan apa saja yang dipandang perlu dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sebagaimana yang ditentukan oleh para pengambil keputusan di daerah itu. Pemerintah pusat telah mempunyai urusan atau fungsi yang terinci, sementara sisanya merupakan fungsi atau urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Hoessein & Smith seperti yang dikutip oleh Muluk, 2007: 10). *Ketiga*, ia bermakna daerah otonom: Hoessein seperti yang dikutip Muluk, (2007: 10) menjelaskan bahwa pembentukan daerah otonom yang secara simultan merupakan kelahiran status otonomi berdasarkan atas aspirasi dan kondisi obyektif dari masyarakat yang berada di wilayah tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah nasional. Masyarakat yang menuntut otonomi melalui desentralisasi menjelma menjadi daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Peran Pemerintah Daerah

Meenakshisundaram (*dalam*, Jha dan Mathur, 1999: 60) menguraikan beberapa peran pemerintahan daerah (*the roles of local government*) yang dapat ditemukan dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Peran pemerintahan daerah yang dimaksud, sebagai berikut:

- a. Menjadi senjata efektif dalam menghadapi tekanan lokal dengan menampung & mengartikulasikan kepentingan lokal, menjadi media pendidikan politik bagi masyarakat yang merasakan langsung pelaksanaan fungsi pemerintah.
- b. Karena kedekatannya secara lokasi, dalam penyediaan pelayanan jasa bisa berlangsung lebih efisien.

- c. Perencanaan dapat lebih baik karena lebih mengetahui kondisi lokalnya, dengan penggunaan tenaga lokal yang lebih efisien pula.
- d. Pejabat pemerintah bertanggung jawab lebih baik karena hubungan dengan publik lebih dekat.
- e. Pemerintah daerah dapat menjadi medium komunikasi efektif antara pusat dengan masyarakat lokal terkait dengan program pemerintah pusat di daerah.

Terkait dengan peranan pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik maka ada beberapa urusan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka menjalankan urusan rumah tangganya sendiri. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi: perencanaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; penanggulangan masalah sosial; pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan; pelayanan kependudukan dan catatan sipil; pelayanan administrasi umum pemerintahan; pelayanan administrasi penanaman modal; penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. Urusan pilihan ini meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata.

Selanjutnya dalam PP No. 38 tahun 2007 lebih diperinci lagi urusan yang menjadi kewenangan daerah yang dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini meliputi: pendidikan; kesehatan; lingkungan hidup; pekerjaan umum; penataan ruang; perencanaan pembangunan;

perumahan; kepemudaan dan olahraga; penanaman modal; koperasi dan usaha kecil dan menengah; kependudukan dan catatan sipil; ketenagakerjaan; ketahanan pangan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; perhubungan; komunikasi dan informatika; pertanahan; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan; dan perpustakaan.

Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan ini meliputi: kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; industri; perdagangan; dan ketransmigrasian.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 dan PP No. 38 tahun 2007, maka pelayanan kesehatan termasuk urusan wajib pemerintah daerah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam kerangka otonomi daerah maka pemerintah daerah berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi sebenarnya menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat sangat penting dalam memberikan masukan tentang kualitas pelayanan yang mereka terima agar penentuan kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh pemerintah atau lembaga yang memberikan pelayanan (provider), tetapi ditentukan secara bersama-sama antara provider dengan user, customer, client, atau citizen sebagai komunitas masyarakat pengguna jasa pelayanan. (Supriyono, 2002).

Pelayanan Publik

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. (Pasolong, 2007: 128).

Moenir menyatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. (Pasolong, 2007: 128).

Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat dan Negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Inu Kencana mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. (Sinambela, 2007: 5).

Pelayanan publik menurut Sinambela (2007: 5) adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Agung Kurniawan menyatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. (Kurniawan seperti yang dikutip oleh Pasolong, 2007: 128).

Sementara itu, pengertian pelayanan publik menurut Kepmen PAN Nomor 25 Tahun 2004 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sinambela, 2007: 5).

Dengan demikian, pelayanan publik adalah upaya pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh aparatur pemerintah dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan Kesehatan

Kepmen PAN No. 58 tahun 2002 mengelompokkan pelayanan publik menjadi tiga yaitu: pelayanan administratif, pelayanan barang dan pelayanan jasa. pelayanan jasa didefinisikan sebagai jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan pra sarana serta penunjangnya. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. (Pasolong, 2007: 129).

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dipahami bahwa pelayanan kesehatan merupakan termasuk dalam bentuk pelayanan jasa. Adapun pelayanan kesehatan menurut Levey dan Loomba (seperti yang dikutip oleh Azwar, 1996: 35) adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.

Sesuai dengan batasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa bentuk dan jenis pelayanan kesehatan yang dapat ditemukan banyak macamnya. Menurut Azwar (1996: 36) perbedaan bentuk dan jenis pelayanan kesehatan umumnya ditentukan oleh: 1) Pengorganisasian pelayanan, apakah dilaksanakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi; 2) Ruang lingkup kegiatan, apakah hanya mencakup kegiatan pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan atau kombinasi padanya; 3) Sasaran pelayanan kesehatan, apakah untuk perseorangan, keluarga, kelompok ataupun untuk masyarakat secara keseluruhan.

Secara lebih rinci, menurut Leavel dan Clark (seperti yang dikutip Azwar, 1996: 36) terdapat perbedaan kedua bentuk pelayanan kesehatan ini, yang secara sederhana dapat diuraikan pada table berikut:

Perbedaan Pelayanan Kedokteran dengan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

PELAYANAN KEDOKTERAN	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
-----------------------------	---------------------------------------

1. Tenaga pelaksana terutama adalah para dokter	1. Tenaga pelaksana terutama ahli kesehatan masyarakat
2. Perhatian utamanya pada penyembuhan penyakit	2. Perhatian utamanya pada pencegahan penyakit
3. Sasaran utamanya adalah perseorangan atau keluarga	3. Sasaran utamanya adalah masyarakat secara keseluruhan
4. Kurang memperhatikan efisiensi	4. Selalu berupaya mencari cara yang efisien
5. Tidak boleh menarik perhatian karena bertentangan dengan etika kedokteran	5. Dapat menarik perhatian masyarakat, misalnya dengan penyuluhan kesehatan
6. Menjalankan fungsi perseorangan dan terikat dengan undang-undang	6. Menjalankan fungsi dengan mengorganisir masyarakat dan mendapat dukungan undang-undang
7. Penghasilan diperoleh dari imbal jasa	7. Penghasilan berupa gaji dari pemerintah
8. Bertanggungjawab hanya kepada penderita	8. Bertanggungjawab kepada seluruh masyarakat
9. Tidak dapat memonopoli upaya kesehatan dan bahkan mendapat saingan	9. Dapat memonopoli upaya kesehatan
10. Masalah administratif amat sederhana.	10. Menghadapi berbagai persoalan kepemimpinan

Sumber: Azwar, 1996:37

Berdasarkan bentuk dan jenis pelayanan kesehatan di atas maka pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari sasarannya pada masyarakat secara keseluruhan, penghasilan pegawai berupa gaji dari pemerintah dan dapat memonopoli upaya kesehatan.

Kualitas Pelayanan Publik

Kata Kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti: kinerja (*performance*), keandalan (*reliability*), mudah dalam penggunaan (*ease of use*), dan estetika (*esthetics*). (Sinambela, 2007: 6).

Adapun dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (*meeting needs of customers*). (Sinambela, 2007: 6).

Berdasarkan pengertian kualitas, baik yang konvensional maupun yang lebih strategis oleh Gaspersz dalam Sampara Lukman (Sinambela, 2007: 6-7) mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu pada pengertian pokok: 1) kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik

keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk; 2) kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.

Agar pelayanan yang diberikan berkualitas tentu saja kedua kualitas yang dimaksud harus terpenuhi. Negara berkembang umumnya tidak dapat memenuhi kedua kualitas tersebut sehingga pelayanan publiknya kurang memuaskan.

Frederickson merupakan pelopor *New Public Administration* (1988:13) menyatakan bahwa: Administrasi Negara Baru berusaha menurut cara yang sama untuk menuntut perubahan yang akan meningkatkan sarannya – manajemen yang baik, efisiensi, ekonomi, dan keadilan sosial.

Teori ini secara substansial mengungkapkan bahwa pelayanan publik yang berkualitas yaitu: a) Pelayanan dengan manajemen yang baik, menekankan pada pengaturan (manajemen) pelayanan publik; b) Efisiensi, menekankan penyediaan pelayanan yang lebih baik dengan sumber-sumber daya yang tersedia; c) Ekonomis, menekankan penyediaan pelayanan yang semurah mungkin dan dapat dijangkau masyarakat (pengguna pelayanan); d) Keadilan sosial, menekankan persamaan hak dalam pelayanan pemerintahan; e) Daya tanggap lebih terhadap kebutuhan warga negara ketimbang terhadap kebutuhan-kebutuhan organisasi publik.

New Public Administration yang pelopori oleh Frederickson lebih menekankan pada teori-teori normatif, filosofis dan aktivisme. Hal yang banyak dibahas adalah yang berkenaan dengan nilai, etika, keadilan sosial, hubungan antar birokrasi dengan pihak yang dilayani serta masalah-masalah yang luas seperti urbanisasi, teknologi dan kekerasan. Hal yang baru yang menjadi penekanan dari gerakan ini adalah segi moral, dan karenanya administrasi tidak netral. Administrasi publik baru mengasumsikan adanya sejumlah nilai yang harus diaktualisasikan yang mempunyai implikasi struktural maupun manajerial. Dalam *New Public Administration* ada beberapa nilai yang ingin dicapai dalam pelayanan publik yaitu: daya tanggap (*responsiveness*), partisipasi pekerja dan warga negara dalam pengambilan keputusan, keadilan sosial, pilihan warga negara, dan tanggung jawab administratif untuk keefektifan program.

Penutup

Pelayanan publik diberi makna yang luas, artinya tidak hanya sebatas pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tetapi juga menyangkut semua kegiatan yang dilakukan pemerintah baik langsung atau tidak langsung dalam

rangka memenuhi kepentingan publik. Pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan masyarakat umum yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan.

Rendahnya kualitas pelayanan publik di berbagai daerah menunjukkan masih belum maksimalnya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam kerangka kebijakan otonomi daerah, pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan merupakan salah satu tugas pemerintahan daerah yang sudah didesentralisasi oleh pemerintah pusat (pasal 22 UU No. 32 tahun 2004). Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur sistem pemerintahan dan rumahtangganya sendiri di bidang kesehatan dengan memilih kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki daerah. Kewenangan daerah ini merupakan konsekuensi logis untuk mencapai efektivitas pengelolaan pelayanan, sekaligus suatu tanggungjawab yang harus dilaksanakan sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan besarnya peran pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan di bidang kesehatan sehingga harus ada upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Azrul. 1996. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Binarupa Aksara: Jakarta.
- Dwiyanto, Agus, et al, 2006. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Frederickson, George, 1988. *Administrasi Negara Baru (terjemahan)*. LP3ES: Jakarta.
- Jha, S.N. & Marthur, P.C. 1999. *Decentralization and Local Politics: Reading in Indian Government and Politics-2*. New Delhi London: Sage Publications.
- Kompas, Edisi 26 November 2008.

- Muluk, M.R. Khairul. 2007. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayu media Publishing.
- Pasolong, Harbani, 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Al Fabela.
- Sekeon, Sekplin AS, 2004. Gambaran Pelayanan Kesehatan Di Wilayah Kerja Puskesmas Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di akses via internet tanggal 11 Desember 2008. [www. Litbang.depkes.go.id](http://www.Litbang.depkes.go.id)
- Sinambela, Lijan Poltak, 2007. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan dan Implemetasi)*. Jakarta: PT bumi Aksara.
- Supriyono, Bambang, 2002. *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol II No.2 Maret-Agustus.
- Stewart, John, 1995. *Understanding The Management of Local Government: its Special Purposes, conditions and Tasks*. Pitman Publishing: London.

**MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA
PELAJARAN EKONOMI MELALUI PEMBELAJARAN
KOOPERATIF DENGAN STRATEGI TPS DI KELAS X-1
SMA NEGERI 3 KOTA GORONTALO**

Sawiyah Habibie
Guru SMA Negeri 3 Gorontalo

Abstrak: Keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan sangat tergantung pada keberhasilan guru merancang materi pembelajaran. Salah satu pendekatan pembelajaran kontekstual yang saat ini sedang diuji coba adalah model pembelajaran kooperatif (*cooperative learning*) dengan strategi TPS (*Think-Pair-Share*) yang merupakan suatu strategi pembelajaran dimana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling bekerja sama dan membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran. Dalam pembelajaran dengan strategi TPS tidak hanya mempelajari materi saja, namun siswa juga harus mempelajari keterampilan-keterampilan kooperatif untuk bekerja dalam tim seperti bagaimana mendengarkan merespon, menyetujui, memperjelas, mendorong dan mengevaluasi. keterampilan-keterampilan ini perlu bagi anggota tim dapat bekerja sama secara produktif.

Kata-kata kunci: hasil belajar siswa, strategi TPS

Pembelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas (SMA) mengacu pada kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, setiap sekolah/madrasah mengembangkan kurikulum berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) dan berpedoman kepada panduan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dengan tujuan guru memperoleh pemahaman lebih luas untuk mengembangkan materi pembelajaran, memberikan gambaran strategi implementasi pengembangan materi pembelajaran, mendorong peningkatan mutu pembelajaran melalui proses pengembangan materi pembelajaran yang efektif, yang harus dicapai oleh peserta didik setelah melalui pembelajaran dalam jenjang dan waktu tertentu, sehingga pada gilirannya mencapai standar

kompetensi lulusan (SKL) setelah menyelesaikan pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu secara tuntas.

Agar peserta didik dapat mencapai SK, KD, maupun SKL yang diharapkan, perlu didukung oleh berbagai standar lainnya, antara lain standar proses dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk membantu peserta didik mencapai berbagai kompetensi yang diharapkan, pelaksanaan atau proses pembelajaran perlu diusahakan agar interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan kesempatan yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Analisis terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar juga merupakan bagian sangat penting dalam mendukung keseluruhan komponen dari materi pembelajaran tersebut. Kemampuan guru dan sekolah dalam mengembangkan indikator berpengaruh pada kualitas kompetensi peserta didik di sekolah.

Dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20, diisyaratkan bahwa guru diharapkan mengembangkan materi pembelajaran, yang kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses, yang antara lain mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran yang mensyaratkan bagi pendidik pada satuan pendidikan untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Salah satu elemen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran adalah model pembelajaran. Dengan demikian, guru diharapkan untuk mengembangkan materi pembelajaran sebagai salah satu sumber belajar dan acuan pembelajaran, dengan memilih model pembelajaran yang tepat. Guru melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan prosedur pelaksanaan pembelajaran, termasuk pemilihan model pembelajaran.

Belajar merupakan usaha manusia membangun pengetahuan dalam dirinya. Serangkaian dengan keinginan manusia yang lebih baik, maka banyak usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas belajar. Menurut Winataputra, dkk (1993 :148) bahwa: Belajar merupakan perubahan tingkah laku. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan dan pengalaman. Untuk disebut belajar, maka perubahan itu harus relatif menetap. Tingkah laku mengalami perubahan karena belajar menyangkut berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti perubahan dalam pengertian, pemecahan suatu masalah atau berpikir, keterampilan, kecakapan, kebiasaan atau sikap.

Dari pengertian di atas jelas bahwa inti belajar adalah perubahan tingkah laku individu. Perubahan tersebut diperoleh melalui latihan maupun pengalaman. Marpaung (2002:10) mengemukakan bahwa pengalaman dalam proses belajar adalah terjadinya interaksi antara individu dengan lingkungannya.

Pengertian lain mengenai belajar dikemukakan oleh Uzer dan Setiawati (2004:4) bahwa "Belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan lingkungan, sehingga mereka mampu berinteraksi dengan lingkungannya".

Dengan demikian diperoleh suatu kesimpulan bahwa belajar pada dasarnya merupakan proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Perubahan tingkah laku dimaksud meliputi perubahan pemahaman, pengetahuan, sikap, keterampilan dan kebiasaan.

Selanjutnya, pembelajaran merupakan inti pendidikan secara keseluruhan, dimana guru sebagai pemegang peranan utama. Uzer (2000:4) mengemukakan bahwa "Peristiwa pembelajaran banyak berakar dari berbagai pandangan dan konsep. Oleh karena itu, perwujudan proses pembelajaran dapat terjadi dalam berbagai model".

Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang terjadi dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, maka proses pembelajaran tidak sekedar proses penyampaian pesan berupa materi kepada siswa, tapi lebih luas lagi yaitu untuk menanamkan sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang belajar.

Menurut Hamalik (1983:21) belajar dapat diartikan sebagai suatu bentuk pertumbuhan dan perubahan pada diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. Perumusan ini mengandung beberapa pengertian perubahan tingkah laku, pengalaman dan latihan serta proses belajar itu sendiri yang perlu mendapat kejelasan lebih dahulu.

Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa Materi pembelajaran (*instructional materials*) adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.

Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum, yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang harus dicapai oleh peserta

didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta tercapainya indikator.

Untuk mewujudkan harapan di atas, peranan guru sangat menentukan. Guru hendaknya memperhatikan dan menjadikan bahwa peningkatan kemampuan berbahasa peserta didik menjadi prioritas dalam pelaksanaan belajar mengajar di sekolah dengan tidak mengesampingkan materi-materi lainnya yang mendukung proses pembelajaran tersebut. Yang tidak kalah penting juga diperhatikan adalah metode yang tepat sesuai dengan materi yang diajarkan, serta alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan peserta didik.

Menurut Mulyasa (2002:5) bahwa Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan suatu konsep yang mengharapkan para siswa dapat dibekali dengan berbagai kemampuan yang sesuai dengan tuntutan zaman dan tuntutan reformasi, sehingga mampu menjawab tantangan, arus globalisasi, berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial, lentur dan adaptif terhadap berbagai perubahan.

Dengan demikian sekolah diharapkan dapat melakukan proses pembelajaran yang efektif, dapat mencapai tujuan yang diharapkan, materi yang diajarkan relevan dengan kebutuhan masyarakat, berorientasi pada hasil (*out put*), dan dampak (*out come*), serta melakukan penilaian, pengawasan, dan pemantauan berbasis sekolah secara terus menerus dan berkelanjutan.

Kenyataan menunjukkan bahwa pendekatan dalam pembelajaran sebelum diterapkannya Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah pembelajaran yang berpusat pada guru, kurang memberikan kesempatan kepada siswa dalam berbagai mata pelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir holistik (menyeluruh), kreatif, objektif, dan logis. Dan inilah salah satu alasan mengapa KBK menerapkan pendekatan pengajaran dan pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*).

Olehnya, dengan pendekatan pembelajaran TPS ini, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi melalui model pembelajaran kooperatif (*Cooperative Learning*) dengan strategi TPS (*Think-Pair-Share*)

Adapun manfaat dari penelitian tindakan kelas ini adalah:

1. Untuk mendapatkan gambaran upaya peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi melalui model pembelajaran kooperatif (*Cooperative Learning*) dengan strategi TPS (*Think-Pair-Share*)

2. Sebagai bahan masukan bagi guru-guru Ekonomi dalam meningkatkan pembelajaran di kelas dengan inovasi-inovasi yang baru

Metode

Penelitian ini merupakan suatu penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 Gorontalo, kelas yang akan dikenai tindakan dalam penelitian ini ialah kelas X-1 dengan jumlah siswa 34 orang yang terdiri dari 19 perempuan, dan 15 siswa laki-laki.

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2009/2010, selama 4 bulan yaitu persiapan satu bulan, pelaksanaan satu bulan, dan pengolahan data selama dua bulan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rancangan model spiral Kemmis dan Taggart dalam Hopkins(1993:84) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Perencanaan

1. Meminta izin kepada Kepala sekolah untuk memperoleh persetujuan pelaksanaan penelitian.
2. Menghubungi serta meminta kesediaan guru ekonomi lainnya sebagai partisipan, membantu peneliti memantau jalannya kegiatan belajar mengajar serta memberikan input yang diperlukan.
3. Menyusun rencana penelitian secara menyeluruh yang meliputi siklus dan tindakannya
4. Menyiapkan perangkat pembelajaran seperti :
 - Program tahunan
 - Program Semester
 - Satuan Pelajaran (SP)
 - Rencana Pelajaran (RPP)
 - Lembar Kerja Siswa (LKS)
5. Menyusun / menetapkan teknik penelitian

Tindakan

Siklus I

1. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran kooperatif dengan strategi Think Pair Share (TPS).
2. Memantau proses belajar mengajar dengan segala unsur
3. Mengadakan evaluasi dengan tes tertulis
4. Menganalisis hasil pantauan
5. Mengadakan refleksi terhadap hasil pemantauan dan hasil tes

Jika siklus I dipandang belum memuaskan hasilnya, maka pelaksanaan tindakan kelas dilanjutkan dengan siklus berikutnya.

Siklus II

1. Merumuskan tindakan baru
2. Melaksanakan tindakan baru
3. Mengevaluasi hasil pemantauan
4. Mengadakan refleksi.

Jika siklus II dipandang sudah memuaskan hasilnya maka pelaksanaan tindakan kelas tidak perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya.

Refleksi

Hal-hal yang direfleksikan dalam kaitannya dengan hasil pemantauan dan hasil tes.

Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan

Instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tindakan ini adalah sebagai berikut :

1. Tes adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang diadakan dan dijawab oleh siswa. Teknik tes ini digunakan untuk menjangkau data mengenai hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi. Tes ada dua macam yaitu pre-test dan pos-test, dimana pre-test diberikan sebelum pelajaran dimulai dalam bentuk lisan dan pos-test diberikan pada akhir pelajaran dalam bentuk tulisan.
2. Lembar observasi adalah lembaran yang berisi sejumlah aspek kegiatan belajar mengajar yang digunakan untuk menjangkau proses pembelajaran.

Kriteria Keberhasilan Pencapaian tindakan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian tindakan ini dirumuskan kriteria sebagai berikut:

1. Kegiatan belajar mengajar yang dinilai melalui lembar observasi berupa cek list.
2. Tes yang dibuat oleh guru peneliti bersama guru seprofesi yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam pencapaian indikator.
3. Ketuntasan hasil belajar siswa dalam proses belajar minimal 85%
4. Standar ketuntasan hasil belajar siswa dalam proses belajar minimal 65 %.

Penyusunan Laporan

Laporan ini disusun melalui pengumpulan data dengan mengukur hasil belajar siswa. Dalam penyusunan hasil laporan ini yang akan dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Melakukan konsultasi dengan Kepala sekolah yang berhubungan dengan penelitian yang di ambil.
2. Menyusun konsep laporan hasil penelioti
3. Melaksanakan konsultasi dengan guru seprofesi menyangkut menyangkut nilai penelitian yang dilakukan
4. Menyusun laporan akhir penelitian

Analisa Data

Analisa data menggunakan prosentase dan dilakukan pembahasan secara kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Siklus I

Kegiatan Belajar Mengajar

Pelaksanaan penelitian ini diadakan dikelas X-1 SMA Negeri 3 Gorontalo dengan jumlah siswa 34 orang. Pengamatan pada proses belajar mengajar yang dilakukan pengamatan belum menampakkan hasil yang diharapkan. Hal ini terlihat pada hasil pemantauan terhadap kegiatan belajar mengajar pada 21 aspek yang dinilai.

Untuk melihat hasil pengamatan kegiatan belajar mengajar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Pengamatan Kegiatan Belajar Mengajar

Aspek yang diamati	Sangat baik	Baik	Cukup	Kurang
Jumlah aspek	1	10	7	3
Prosentase (%)	4,67	47,61	33,33	14,28

1. Hasil Belajar

Hasil sikulus I ini selain dilihat pada hasil observasi pemantauan kegiatan belajar mengajar juga ditinjau dari nilai yang diperoleh siswa setelah diberikan tes hasil belajar. Untuk nilai hasil belajar ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Hasil Belajar Siswa

Nilai	Jumlah Siswa	Prosentase (%)	Ket.
6,5 ke atas	22	64,70	-
6,5 ke bawah	12	35,30	-

Memperhatikan hasil tes belajar siswa pada siklus I ini maka hasil belajar siswa belum mencapai target seperti pada indikator yang diharapkan yaitu secara klasikal siswa dikatakan tuntas belajar apabila 85% dari jumlah siswa telah memperoleh nilai 6,5 ke atas.

2. Refleksi

Setelah diadakan tindakan, selanjutnya peneliti dan guru mitra mengadakan diskusi tentang hasil pelaksanaan tindakan. Hal ini diperlukan untuk menilai apakah masih diperlukan siklus berikutnya.

Hasil refleksi sebagai berikut:

- a. Pendekatan guru seperti apresiasi, motivasi dan teknik bertanya jauh dari yang diharapkan, sehingga siswa kurang termotivasi.
- b. Dalam bekerja kelompok siswa kurang kompak antar anggota kelompoknya karena guru tidak memonitoring siswa ketika bekerja
- c. Pembimbingan kepada kelompok yang mengalami kesulitan tidak berjalan maksimal
- d. Hasil belajar sebahagian siswa sudah baik secara individu, tapi secara klasikal belum mencapai target yang diharapkan

Dari hasil refleksi di atas maka disepakati untuk dilanjutkan tindakan yang baru atau dilanjutkan ke siklus 2.

Siklus II

Kegiatan Belajar Mengajar

Pada siklus 2 ini lebih ditekankan pada perbaikan siklus I yaitu, faktor apa saja yang kurang diperhatikan pada siklus I, dimaksimalkan seperti pemberian motivasi, bimbingan kepada kelompok yang mengalami kesulitan, perbaikan penggunaan metode pembelajaran sehingga siswa akan lebih memahami materi yang dipelajari melalui strategi pembelajaran yang diterapkan. Hal ini terlihat pada hasil pemantauan terhadap kegiatan belajar mengajar pada 21 aspek yang dinilai.

Untuk melihat hasil pengamatan kegiatan belajar mengajar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Pengamatan Kegiatan Belajar Mengajar

Aspek yang diamati	Sangat baik	Baik	Cukup	Kurang
Jumlah aspek	8	12	1	-
Prosentase (%)	38,09	57,14	4,76	-

1. Hasil Belajar

Hasil siklus 2 ini pun selain dilihat pada hasil observasi pemantauan kegiatan belajar mengajar juga ditinjau dari nilai yang diperoleh siswa setelah diberikan tes hasil belajar. Untuk nilai hasil belajar ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4
Hasil Belajar Siswa

Nilai	Jumlah Siswa	Prosentase (%)	Ket.
6,5 ke atas	29	85,29	-
6,5 ke bawah	5	14,70	-

Memperhatikan hasil tes belajar siswa pada siklus 2 ini maka hasil belajar siswa sudah mencapai target seperti pada indikator yang diharapkan yaitu secara klasikal siswa dikatakan tuntas belajar apabila 85% dari jumlah siswa telah memperoleh nilai 6,5 ke atas.

2. Refleksi

Setelah diadakan tindakan ke dua ini, selanjutnya peneliti dan guru mitra kembali mengadakan diskusi tentang hasil pelaksanaan tindakan. Hal ini diperlukan untuk menilai apakah masih diperlukan lagi siklus berikutnya.

Hasil refleksi sebagai berikut:

- a. Pendekatan guru seperti apersepsi motivasi dan teknik bertanya sudah tepat sehingga siswa terangsang aktif
- b. Metode/model pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan materi yang diajarkan.
- c. Pelaksanaan tindakan sudah sesuai dengan rencana rancangan tindakan
- d. Partisipasi siswa sudah baik

- e. Daya serap hasil belajar siswa sudah memenuhi kriteria ketuntasan belajar seperti pada tabel 4 di atas
- Dari hasil refleksi di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindakan sudah berhasil dan tidak perlu lagi dilanjutkan pada siklus berikutnya.

Pembahasan

Dari hasil yang peneliti lakukan ternyata dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif dengan strategi TPS (*Think Pair Share*) dapat memberikan manfaat bagi guru dalam proses belajar mengajar ekonomi, sebab dengan pendekatan pembelajaran ini guru dalam proses belajar mengajar hanya sebagai pengarah, bukan pengajar sehingga diharapkan bisa membangkitkan motivasi belajar siswa yang pada akhirnya bisa meningkatkan hasil belajarnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilaksanakan dalam dua siklus diperoleh data sebagai berikut:

Siklus I

- a. Siswa yang memperoleh nilai kurang dari 65 adalah 12 orang
- b. Siswa yang memperoleh nilai minimal 65 adalah 22 orang
- c. Daya serap yang diperoleh siswa pada siklus I adalah 64%
- d. Kualifikasi kegiatan belajar mengajar diperoleh data sebagai berikut:
- e. Kualifikasi sangat baik dan baik adalah 52,37%
- f. Kualifikasi cukup dan kurang adalah 47,63%

Berdasarkan observasi awal pada kegiatan belajar mengajar di siklus I, hasil evaluasinya belum menunjukkan ketuntasan belajar, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

- a. Pada pendahuluan, guru tidak menjelaskan adanya keterkaitan materi sebelumnya dengan materi yang diajarkan sebagai bahan apersepsi sehingga siswa kurang memahami keterkaitan antara materi tersebut.
- b. Pelaksanaan diskusi dikelas masih lebih banyak didominasi oleh siswa yang memiliki kemampuan diatas rata-rata
- c. Sebagian siswa belum mampu berpartisipasi aktif dalam proses KBM
- d. Bimbingan guru kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar belum optimal, baik bimbingan secara individu maupun keseluruhan
- e. Teknik bertanya belum efektif, sehingga lebih banyak mengandung jawaban yang tidak diharapkan
- f. Masih terdapat beberapa siswa yang tidak mampu membuat resume
- g. Masih terdapat siswa yang merasa kaku dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dijabarkan dalam lembar kerja siswa

Berdasarkan kelemahan-kelemahan di atas, maka pada siklus 2 diadakan perbaikan-perbaikan melalui penyusunan desain pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif strategi TPS dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pada pendahuluan, melalui apresiasi guru menjelaskan keterkaitan antara materi sebelumnya dengan materi yang diajarkan, sehingga dengan sendirinya siswa akan mengetahui gambaran tentang materi yang akan dibahas nanti
- b. Diusahakan dalam kegiatan kelompok anggota kelompok harus aktif, baik itu dalam pembahasan materi maupun pembahasan soal-soal
- c. Diusahakan siswa dapat bekerja sama, toleransi dan berkomunikasi dalam proses pembelajaran
- d. Guru harus memberikan motivasi kepada siswa yang masih merasa kaku dalam proses pembelajaran
- e. Siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata diberikan motivasi untuk membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan belajar sehingga dominasi siswa lain terhadap siswa lainnya semakin berkurang.

Siklus 2

Dengan perbaikan-perbaikan di atas, maka pada siklus 2 diperoleh data sebagai berikut:

- a. Dari 34 siswa yang memperoleh nilai kurang dari 65 adalah 2 orang
- b. Yang memperoleh nilai 65 ke atas adalah 32 orang
- c. Daya serap yang diperoleh adalah 76%
- d. Kualifikasi pembelajaran sesuai dengan pengamatan dengan menggunakan lembar observasi diperoleh data sebagai berikut:
- e. Kualifikasi sangat baik dan baik adalah 95,24%
- f. Kualifikasi cukup dan kurang 4,76%

Dari hasil penelitian strategi pembelajaran tersebut telah terjadi perubahan-perubahan peningkatan hasil belajar dalam kualifikasi pembelajaran, sebagai berikut:

- a. Siswa yang memperoleh nilai 65 ke atas pada siklus I adalah 64,70% meningkat menjadi 89,24% pada siklus 2
- b. Daya serap siswa pada siklus 1 adalah 64%, pada siklus 2 meningkat menjadi 76%
- c. Kualifikasi pembelajaran yang memperoleh nilai baik dan sangat baik pada siklus I adalah 52,37% meningkat menjadi 95,24% pada siklus 2

Selain perubahan-perubahan di atas, hal yang perlu mendapat perhatian dari guru adalah sebagai berikut: Pendekatan dalam proses belajar mengajar harus disesuaikan dengan kondisi materi yang ada.

Manfaat lain yang diperoleh siswa dengan cara menggunakan model pembelajaran kooperatif strategi TPS yakni siswa telah menyadari diberikan kesempatan yang seluas-luasnya mencari dan menemukan hal-hal yang perlu dikuasai dalam kaitannya dengan materi yang disampaikan guru dan telah memberikan dampak positif terhadap perilaku siswa seperti:

- a. Mau menjawab pertanyaan guru dimulai dari menjawab pertanyaan teman sesama anggota kelompok
- b. Nampak siswa mau berusaha menjawab ketika diberikan permasalahan
- c. Terbina sikap berdialog baik bersama teman anggota kelompok maupun anggota kelompok lain

Hal-hal tersebut merupakan efek langsung dari pengaruh diterapkannya model pembelajaran kooperatif dengan strategi TPS pada mata pelajaran ekonomi, yang biasanya bisa meningkatkan hasil belajar siswa itu sendiri.

Berdasarkan gambaran data dan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas dan hipotesis tindakan yang menyatakan bahwa "apabila guru menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif staretegis TPS maka hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi akan meningkat, telah teruji dengan benar.

Simpulan

Penggunaan pendekatan pembelajaran kooperatif dengan strategi TPS (*Think Pair Share*) dalam proses belajar mengajar sesuai dengan penelitian tindakan kelas pada kelas X-1 di SMA Negeri 3 Gorontalo telah menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa yang cukup signifikan (nilai 65 ke atas meningkat dari 64,70% menjadi 89,24%). Penggunaan pendekatan pembelajaran kooperatif dengan strategi TPS (*Think Pair Share*) ini harus disesuaikan dengan materi yang akan dibahas, karena strategi ini lebih menggunakan kemampuan siswa dalam memahami materi setelah dialog dengan teman sebangku atau pasangan tempat duduk, sebelum di ungkapkan kedalam kelompok yang lebih besar lagi.

Saran

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas diharapkan untuk diterapkan oleh guru mata pelajaran. Karena hal ini merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Dengan penelitian tindakan kelas

ini diharapkan secara obyektif dan lebih terbuka menerima perbaikan-perbaikan guna peningkatan tindakan kelas berikutnya. Penerapan penelitian tindakan kelas seperti ini kiranya dapat memperoleh dukungan dan seluruh guru terutama kepala sekolah yang senantiasa memberikan fasilitas dan secara bersama-sama mengadakan refleksi dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh guru di kelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamalik. Oemar. 1983. *Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mulyasa. E. 2002. *Berbasis Kompetensi: Konsep Karakteristik dan Implementasi*. Bandung : PT. Remajarosdakarya
- Nasution. E. 1984. *Kurikulum dan Pengajaran*, Jakarta: Bina Aksara
- Silverius. Suke. 1991. *Evaluasi Hasil Belajar dan Umpan Balik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Uno. Hamzah. 1999. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Gorontalo: Nurul Jana
- Uzer. Usman. 2001. *Menjadi Guru Yang Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Winkel W.S. 1996. *Psikologi Pengajaran*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Sumber lain:

PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses Pembelajaran.